

## **BAB II**

### **KONDISI PABUARAN PASCA KEMERDEKAAN**

#### **A. Kondisi Masyarakat Pabuaran**

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan, maka terjadilah kesibukan dalam penyusunan organisasi pemerintah Republik Indonesia. Tanggal 18 agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs.M. Hatta secara aklamasi dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang pertama.<sup>1</sup>Setelah itu Undang-undang Dasar 1945 disahkan, kabinet dibentuk, berita proklamasi disebarkan keseluruh pelosok tanah air dan segenap penjuru dunia oleh para pemuda dan rakyat Indonesia.

Barisan-barisan yang dikerahkan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ternyata mendapat rintangan dari Kenpetei Jepang, namun dengan penuh keyakinan rakyat Indonesia selalu membantu penyiaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga seluruh pelosok kota Jakarta segera mengetahuinya. Bahkan tidak hanya terbatas penduduk kota Jakarta saja, tetapi meluas kedaerah-daerah luar di Jakarta dengan perantaraan kereta api, mobil, dan radio.<sup>2</sup>

Pertengahan bulan September tahun 1945, atas desakan pemuda API (Angkatan Pemuda Indonesia) diadakan perundingan dengan para tokoh masyarakat kabupaten Serang, diantaranya adalah: K.H. Ahmad Khatib, K.H. Syam'un dan Zulkarnain Surya Kartalegawa. Perundingan

---

<sup>1</sup>Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudari, *Catatan Masalalu Banten*, edisi III (Serang : Saudara, 1993), p.234.

<sup>2</sup>Sukardi K, Heru, dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949*, (Daerah Jawa Tengah, Jakarta, 1991), p.60.

ini dilaksanakan di tempat kediaman Zulkarnain Surya Kartalegawa, yang berada didekat Rumah Sakit Serang. Dalam perundingan ini dibicarakan tentang pembagian tugas, khususnya dalam pemerintahan di Banten. Hasil perundingan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Pengambilalihan kekuasaan Jepang diserahkan kepada Zulkarnain Surya Kartalegawa.
- 2) Urusan keamanan diserahkan kepada K.H. Ahmad Khatib.
- 3) Urusan yang berhubungan dengan badan-badan atau organisasi perjuangan pemuda diserahkan kepada Ali Amangku.

Dalam perundingan itu para pemuda mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia agar segera mengangkat K.H. Ahmad Khatib sebagai Residen Banten yang menangani administrasi dan pemerintahan sipil di Banten. Dan K.H. Syam'un menangani segala urusan militer yang berada di daerah Banten.

K.H.Ahmad Khatib menerima berita yang disampaikan oleh pemerintah pusat di Jakarta pada tanggal 19 September 1945 yang di tanda tangani oleh Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden tentang pengangkatannya sebagai residen Banten, untuk membantu kelancaran pemerintahan kemudian K.H. Ahmad Khatib menunjuk Zulkarnain Surya Kartalegawa sebagai Wakil Residen. Sedangkan untuk jabatan Bupati didaerah Serang, Pandeglang dan Lebak K.H. Ahmad Khatib meminta agar para Bupati lama untuk sementara tetap dalam jabatannya, para Bupati itu adalah : Raden Hilman Djajadiningrat (Bupati Serang), Mr. Djumhana (Bupati Pandeglang) Raden Hardi Winangun(Bupati Lebak).<sup>3</sup> Sementara itu K.H.Syam'un yang ditunjuk menangani bidang militer segera merealisir pembentukan Badan

---

<sup>3</sup>Michrob dan Chudari, *Catatan Masa Lalu...*, p. 239.

Keamanan Rakyat (BKR) di Karesidenan Banten. Anggota BKR ini terdiri dari bekas anggota Pembela Tanah Air (PETA), Heiho, Hizbullah, Sabilillah, Angkatan Pemuda Indonesia (API), dan lain-lain barisan kelasykaran.

Susunan organisasi BKR masih menggunakan bentuk yang terdapat dalam *Daidan* (kesatuan batalion) pada PETA di masa pendudukan Jepang. Beberapa hari kemudian, terbentuk pula Badan Keamanan Rakyat (BKR)-Laut Banten yang diketuai oleh Gatot yang terdiri dari 2 bagian yaitu: Armada Perikanan dan Pasukan Marinir. Pendirian Badan Keamanan Rakyat (BKR)-Laut Banten disahkan oleh K.H. Ahmad Khatib, selaku Residen Banten, dan K.H. Syam'un, selaku Kepala BKR Serang.

Kedatangan tentara sekutu (NICA) yang akan melucuti tentara Jepang telah diboncengi Tentara Kolonial Belanda tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Pemerintah Kolonial Belanda masih mengakui kekuasaannya atas wilayah Indonesia sebagai Hindia Belanda yang dahulu mereka tinggalkan. Kemudian terjadi dualisme kekuasaan di wilayah yang sama yaitu pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintahan Hindia Belanda (NICA), mereka menginginkan kembali penjajahan atas Bangsa Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya.

Pada masa revolusi terjadi pemberontakan dimana-dimana, terutama di Surabaya sebagai tempat pendaratan Tentara Sekutu mendapatkan perlawanan dari rakyat dengan gigih para pemuda yang berada di Surabaya yang salah satu penggeraknya adalah Bung Tomo pada bulan November 1945, terjadilah pertempuran yang menelan korban dari pejuang kita yang gugur dalam medan pertempuran

sehingga pada setiap tanggal 10 Novemeber 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan.<sup>4</sup>

Pengorbanan yang besar itu sebagai harga yang harus dibayar mahal untuk sebuah kehormatan Bangsa, sehingga dengan masuknya Tentara Sekutu yang membonceng tentara Belanda mengakibatkan perlawanan semakin luas keberbagai wilayah di Indonesia, walaupun perlawanan rakyat dapat dipatahkan, daerah-daerah di Indonesia dapat dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Setelah itu perlawanan tidak begitu saja hilang justru perlawanan rakyat serta Tentara Indonesia semakin kuat dan bisa bertahan bahkan menghancurkan pergerakan Tentara Belanda untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Dipihak Indonesia terdapat fraksi-fraksi yang berbeda pandangan dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Ada kubu yang lebih memilih perundingan diplomasi dan ada kubu yang lebih memilih perjuangan fisik.

Pada awal revolusi fisik pemuda-pemuda Jawa Barat turut aktif dalam menegakkan Proklamasi kemerdekaan dan kedaulatan dengan membentuk badan-badan kelasykaran. Badan kelasykaran yang didirikan antara lain Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) di Bandung dengan ketuanya Suprpto. Tidak lama kemudian organisasi pemuda itu diubah namanya menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI). Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang didirikan oleh *Komite van Aksi* yang bermarkas di Menteng 31 Jakarta. Di Serang didirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API) cabang Banten yang dipimpin oleh

---

<sup>4</sup>Naswir Abu Nain, *Angkatan 66 Dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa*, (Jakarta:Penerbit Cipro Media, 2011), p. 11.

Ali Amangku, kemudian didirikan juga Angkatan Pemuda Indonesia (API) Puteri di bawah pimpinan Sri Sahuli. Para anggota Angkatan Pemuda Indonesia (API) diutus ke daerah-daerah di Banten untuk menyebarkan berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebagai Residen Banten yang dipilih rakyat, K.H. Ahmad Khatib mulai menjalankan tugas dengan menyusun personalia pemerintahan di Karesidenan Banten. Semua pejabat lama tetap duduk dalam jabatan masing-masing. Para bupati yang menjabat waktu itu, masing-masing adalah Bupati Serang Raden Tumenggung Aria Hilman Djajadiningrat, Bupati Pandeglang: Raden Tumenggung Djoemhana Wiriaatmadja, dan Bupati Lebak, Raden Tumenggung Hardiwinangun.

Pada tanggal 15 Oktober tahun 1945, dilakukan pertemuan antara Sekutu dan pihak TKR. Dalam pertemuan itu, pihak Sekutu meminta bantuan pada Tentara Keamanan Rakyat (TKR) agar tugasnya dapat berjalan lancar. Pihak Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pun meminta pada pihak Sekutu agar membantu pihak Republik Indonesia dalam hal keamanan dan ketertiban, terutama untuk mencegah provokasi dari pihak Pemerintah Kolonial Belanda yang mau menjajah Indonesia kembali.<sup>5</sup>

Di Purwakarta dilakukan pembenahan terhadap organisasi Komandemen Jawa Barat, yaitu dengan dibentuknya tiga divisi dan 13 resimen. Ketiga divisi itu adalah Divisi Banten, Divisi Bandung, dan Divisi Cirebon. Divisi Banten yang berkedudukan di Serang ini dinamai Divisi 1000/I (Divisi Seribu Satu), dengan daerah yang

---

<sup>5</sup> Nina H. Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara* (Jakarta Pustaka LP3S Indonesia, 2003), p. 169.

menjadi tanggung jawabnya adalah Karesidenan Banten dan Bogor. Komandannya adalah K.H. Syam'un.

Pada awalnya Divisi 1000/I terdiri atas dua Resimen Infanteri. Resimen I di Serang dengan kekuatan empat batalyon dan Resimen II di Rangkasbitung dengan kekuatan dua batalyon. Resimen I memiliki kekuatan lima batalyon yaitu: Batalyon I di Serang dengan komandan Mayor K.H. Abdullah, Batalyon II di Cilegon, dengan Komandan Mayor Samanhudi, Batalyon III di Serang dengan komandan Mayor Th. Syamsudin Nur, Batalyon IV di Rangkasbitung dengan Komandan Mayor Dudung Padmuskarta dan Batalyon V berkedudukan di Pandeglang komandan Mayor H. Junaedi.<sup>6</sup> Selain resimen infanteri, ada Pasukan Khusus yang merupakan pasukan pengintai. Pasukan yang berada langsung dibawah Komando Divisi ini kemudian menjadi Polisi Tentara Batalyon XI Divisi 1000/I dengan Panglimanya, Mayor Ali Amangku. Batalyon XI ini terdiri atas empat kompi, yaitu Kompi I berkedudukan di Serang, Kompi II berkedudukan di Pandeglang, Kompi III berkedudukan di Rangkasbitung, dan Kompi IV berkedudukan di Balaraja. Lima hari setelah dibentuknya Divisi 1000/I Banten, BKR dari unsur armada dan tentara laut mendirikan Pangkalan I Tentara Laut, disingkat Pangkalan I/TL dengan kekuatan awal empat batalyon Polisi Tentara Laut dan armada Tentara Laut yang bertugas sebagai tentara pertahanan dan keamanan pantai. Untuk melaksanakan pengamanan seharusnya minimal terdiri atas enam batalyon sehingga dibukalah pendaftaran untuk anggota TKR-Laut Pangkalan I Banten.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Lubis, *Banten Dalam...*, p. 174.

<sup>7</sup>Michrob dan Chudari, *Catatan Masalalu...*, p. 237-238.

Dalam perkembangannya, TKR berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dengan singkatan yang masih sama, yaitu Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pada tanggal 7 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah no.2/SD 1946. Kemudian pada tanggal 25 Januari 1946 Pemerintah kembali mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Namun perubahan itu tidak hanya sekadar mengganti nama, tetapi organisasinya pun disempurnakan. Pemerintah menginginkan Tentara Republik Indonesia (TRI) disusun seperti tentara internasional.<sup>8</sup>

Selain tokoh seperti K.H. Achmad Chatib dan K.H. Syam'un, yang terjun ke dunia pemerintahan dan militer, ada juga tokoh lain yang masuk ke dunia politik dan pemerintahan. Pada tahun 1946, Sadeli Hasan (kelahiran Beji, Cilegon) dipilih menjadi Wakil rakyat Banten untuk duduk dalam Kabinet Negara Indonesia Pusat (KNIP). Kemudian seorang tokoh Wanita bernama Maria Ulfah diangkat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia dan menjadi Sekjen Penghubung Wanita Indonesia. Syafrudin Prawiranegara, kelahiran Banten, juga diangkat menjadi Menteri Keuangan.

Pertempuran antara Tentara Republik Indonesia (TRI), lasykar-lasykar, dan rakyat dengan Sekutu terjadi diberbagai tempat. Ketika tersiar berita bahwa ada kemungkinan pasukan Belanda akan menyerang secara besar-besaran pada bulan Mei 1947, Gubernur Jawa Barat pada masa itu, M.Sewaka mengadakan peninjauan ke beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu ke Bandung Selatan, Sukabumi, dan Banten, untuk memperingatkan pemerintah daerah setempat. Pengungsian untuk menghindari serangan tentara Belanda juga

---

<sup>8</sup>Lubis, *Banten Dalam...*, p. 173-174.

dilakukan pemerintah kabupaten kecuali pemerintahan diwilayah Banten, dan untuk sarana informasi dan komunikasi pada tanggal 1 Maret tahun 1947, Radio Perjuangan Banten diresmikan.<sup>9</sup>

Pemerintah pusat tidak tinggal diam melihat serangan tentara Belanda terhadap wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jawa Barat. Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan memulihkan keamanan melalui jalan diplomatik terus dilakukan. Beberapa perundingan dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda, antara lain Perjanjian Linggajati pada bulan November 1946 yang ditandatangani tanggal 25 Maret tahun 1947 dan Perjanjian Renville yang ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Meskipun isi kedua perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak Pemerintah Belanda, namun tampaknya Pemerintah Belanda belum puas dengan hasil yang didapatnya. Mereka menginginkan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda kembali ke tangannya. Hal itu tampak dari dilanggarnya kedua perjanjian Linggajati dan Renville oleh Belanda.

Setelah Jakarta dikuasai oleh Belanda, untuk menciptakan suatu daerah yang aman dan cukup luas disekitar Jakarta, Belanda berusaha untuk memperluas kekuasaannya ke arah barat. Tangerang yang merupakan pintu sebelah timur bagian Banten, juga dikuasainya pada bulan mei 1946. Rakyat Tangerang yang tidak mau dijajah kembali oleh Belanda, mengungsi sebagian ke daerah Tangerang yang masih dikuasai Indonesia dan sebagian ke daerah Banten. Dengan demikian beban ekonomi Banten bertambah berat karena harus menghidupi para

---

<sup>9</sup> Lubis, *Banten Dalam...*, p. 175.

pengungsi itu. Palang Merah Indonesia menolong mereka dengan mendirikan dapur-dapur umum.

Pasukan tentara Belanda terus memperluas daerah kekuasaannya ke arah barat. Pada bulan Juni 1946 Belanda menyerbu Curug, Mauk, dan Balaraja. Kemudian Resimen Tangerang mundur lagi ke Cigudeg meninggalkan daerah Tangerang. Pada bulan Desember 1946 Belanda berusaha untuk memasuki daerah Banten dari arah barat yaitu dari Selat Sunda. Lima buah kapal selam Belanda muncul disebelah barat pelabuhan Merak, tetapi kemudian menghilang setelah tembakan meriam mereka dibalas oleh pasukan Republik Indonesia.<sup>10</sup> Tidak lama setelah itu, sebuah kapal pengangkut Belanda berlabuh di pelabuhan Merak akan tetapi pada pagi harinya kapal itu menghilang.

Belanda juga menguasai seluruh pintu masuk ke Banten termasuk menduduki Bogor dengan diduduki daerah-daerah itu maka Banten semakin terkepung. Belanda dengan aksi militer pertamanya tidak terus menyerang dan menduduki Banten, melainkan memusatkan perhatiannya pada daerah-daerah lainnya yaitu Keresidenan Bogor, Priangan, dan Cirebon. Didaerah Jakarta Barat dan Bogor Barat, Belanda hanya memperluas sampai Sukabumi dan Pelabuhan Ratu. Sehingga dengan didudukinya kedua daerah itu, maka blokade terhadap Banten semakin ketat. Garis pertahanan Indonesia memanjang sepanjang kurang lebih 250 Km, mulai dari Mauk melingkar ke daerah Parungpanjang melengkung kedaerah Leuwiliang dan terus keselatan melalui daerah perbatasan Bogor-Sukabumi melewati Rabig dan

---

<sup>10</sup>Suharto, *“Dinamika Suatu Daerah Terisolasi: Banten, Antara Dua Agresi Militer Belanda”*(Fakultas Sastra Indonesia,1996), p. 5

Cibareno dan berakhir dipantai Samudra Indonesia.<sup>11</sup> Dengan penjagaan yang ketat itu maka untuk masuk kedaerah Banten dan sebaliknya tidak mudah bahkan sangat berbahaya.

Blokade Belanda mempunyai dampak yang luar biasa bagi Banten, akibat blokade itu barang-barang kebutuhan sehari-hari yang biasanya di datangkan dari luar daerah Banten sulit diperoleh, akibatnya harga melambung tinggi guna mengatasi kebutuhan ada yang ditempuh dengan membuat sendiri atau mengganti dengan bahan lain adapula yang membelinya keluar daerah Banten. Beberapa jenis barang tersebut diantaranya bensin, vaselin, granat, garam dan bahan komoditi lainnya. Bahkan minyak pelumas juga dibuat sendiri dari minyak kelapa sawit, kekurangan senjata diatasi dengan membuat mortir, larasnya dibuat dari pipa bekas tiang listrik, akan tetapi karena tidak dilengkapi dengan alat kontrol maka sering pelurunya tidak melontar, dan juga alat-alat semisal bom tarik dan geranat bambu. Begitu juga dengan keadaan masyarakat Pabuaran merasakan kelangkaan barang-barang yang selama ini dijadikan kebutuhan sehari-hari. Harga semakin tidak dapat dijangkau karena harga yang semakin melambung tinggi, kelangkaan bahan pokok itu masyarakat Pabuaran mensiasatinya dengan barang-barang apa adanya seperti: minyak tanah diganti dengan minyak kelapa bahkan ada yang hanya menyalakan kayu bakar dan daun kelapa tua untuk penerangan malam hari.

Masyarakat Pabuaran merasakan blokade Belanda sampai kelangkaan bahan tekstil, baju celana bahkan dari mereka ada yang hanya menggunakan celana saja karena ketiadaan barang-barang

---

<sup>11</sup> Suharto, "*Dinamika Suatu...*", p. 5-6.

tersebut, tidak hanya kelangkaan barang saja di Pabuaran terjadi pencurian bahan pangan maupun hewan ternak mereka banyak yang hilang pada malam hari dikarenakan penerangan yang mengandalkan lampu tempel (lampu totok) yang tidak bertahan lama karena minyak tanah sudah hilang diganti minyak kelapa.<sup>12</sup>

Kemakmuran daerah Banten mengalami penurunan yang hebat sekali sejak jaman Jepang. Setelah kemerdekaan daerah ini tidak diberikan kesempatan untuk membangundan langsung berhubungan dengan daerah-daerah tetangganya, baik perjanjian Linggajati maupun Renville tidak memberikan kelonggaran kepada daerah ini untuk merehabilitasi kemakmurannya, sedikit demi sedikit tenaga petani menghilang pindah ke daerah seperti Lampung dan Jakarta, setelah tenaga petani dilumpuhkan, maka beribu-ribu ekor kerbau menyebrang kearah timur melalui daerah-daerah yang tidak terjaga oleh Belanda dan inilah sebab terlantarnya pertanian di Banten, sehingga menyebabkan kelangkaan bahan pangan.

Akibat yang sangat fatal dari blokade Belanda adalah Banten tidak menerima lagi kiriman uang dari pemerintah pusat, maka kekurangan uang itu diatasi dengan mencetak uang sendiri yang diberinama Uang Republik Indonesia Daerah Banten (URIDAB) tepatnya bulan Agustus 1947 setelah pemerintah tidak dapat membayar gaji pegawai karena uang tidak ada, keadaan uang Banten itu tidak bertahan lama. Pada pertengahan tahun 1948, uang bernilai 25 di palsukan karena uang sebagai nilai tukar sudah tidak dapat di percaya lagi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Suharto, "*Dinamika Suatu...*",p.6.

<sup>13</sup>Suharto, "*Dinamika Suatu...*", p. 15.

Blokade Belanda yang ketat terhadap Banten sejak dilancarkan aksi militer pertama, membuat daerah ini terkucil dan terasing dari pemerintahan pusat yang berkedudukan di Yogyakarta maupun pemerintah propinsi Jawa Barat yang untuk sementara ada di Tasikmalaya. Banten tampil daerah yang rusak parah. Tidak ada sedikitpun usaha pertanian atau bercocok tanam, sawah dan kebun penuh dengan semak dan rumput-rumput liar, bahkan yang ada hanya terlihat pucuk pohon kelapa yang telah habis dimakan orang kelaparan yang dialami sejak akhir jaman Jepang, kondisi seluruh wilayah Banten yang di isolasi dan diblokir sedemikian parahnya membuat penduduk dan aparat pemerintah kehabisan tenaga dan semangat tetapi jiwa mereka masih kuat bahkan semakin bersatu padu untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Perjanjian pertama (Linggajati) dilanggar dengan melakukan serangan kewilayah Republik Indonesia dimulai tanggal 21 Juli 1947, yang dikenal Agresi Belanda I. Kemudian perjanjian kedua 19 Desember tahun 1948 dikenal dengan Agresi II Belanda, sehingga mengakibatkan penembakan senjata terjadi dimana-mana, khususnya di Serang.<sup>14</sup>

Rencana Belanda yang mengulur-ulur waktu sebelumnya sudah diperkirakan oleh TNI pasti akan melakukan serangan kembali, karena serbuan Belanda sudah diperhitungkan maka angkatan bersenjata mengadakan persiapan-persiapan yang awalnya perlawanan secara linier diganti dengan sistem perang *wehrkreise* ( perang wilayah) atau perang geriliya. Selain itu pasukan-pasukan yang sebelumnya hijrah akibat dari perjanjian Renville, kembali menyusup ke daerah musuh

---

<sup>14</sup>Lubis, *Banten Dalam...*, p. 176.

untuk kembali ke daerahnya, rencana itu tertuang dalam intruksi Panglima Besar tanggal 9 November 1948 yang dikenal dengan perintah siasat no 1 Perintah itu antara lain; pertama, memperlambat serangan Belanda dengan melaksanakan pengungsian dan melakukan bumihangus secara total. Kedua, membuat kantong-kantong disetiap Kewedanan militer disamping persiapan oprasi militer dilakukan juga persiapan penyelenggaraan pemerintah militer. Pada waktu itu pemerintahan desa dijadikan basis pertahanan yang utama dengan sandaran kekuatan pada pengerahan tenaga rakyat.

Agresi Belanda I Banten di blokade dari berbagai sektor oleh Belanda, barulah pada Agresi Belanda II Banten diserang dan dikuasai oleh Belanda dengan mengirimkan Pasukan Brigade Infanteri 1 Divisi 7 Desember yang berkekuatan sekitar 1000 personil dibawah pimpinan Kolonel Blanken, yang dilakukan dua tahap, tahap pertama mereka secepat mungkin menyerbu dan mengikuti jalan raya untuk menduduki kota-kota dan pusat-pusat perhubungan. Pada tanggal 23 Desember 1948, mereka melancarkan operasi pembersihan kekuatan TNI sektor demi sektor, dan membentuk pemerintahan sipil serta merehabilitasi jalan yang rusak. Pada tanggal 23 Desember 1948 Pasukan Belanda tiba dipantai utara masuk ke Tangerang dengan kekuatan satu batalyon infanteri yang diperkuat oleh artileri medan, satu pleton mitraliur, dua pleton zeni dan satu kompi angkutan bermotor yang dipelopori oleh satu eskadron kavaleri lapis baja, mereka masuk melewati daerah Mauk dan ada juga yang langsung menuju Serang, sehingga perlawanan demi perlawanan Tentara Indonesiadan rakyat yang ada diperbatasan wilayah Banten dapat dipukul mundur.

Belanda semakin leluasa masuk ke Serang tanpa ada perlawanan, karna pasukan TNI di Serang sebelumnya sudah menarik diri ke daerah-daerah disekitar Serang untuk bergabung dengan rakyat dan melakukan perang gerilya termasuk di wilayah Cipelem, Pabuaran dan sekitarnya sesuai dengan rencana yang sebelumnya sudah diinstruksikan oleh pimpinan militer.

Tahun 1949 terjadi peristiwa pemberontakan Cipelem yang berada di wilayah Pabuaran, merupakan suatu perang total yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Adapun pada masa Agresi II Belanda para pemudalah yang paling sentral dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan kekuatan fisik dan senjata seadanya. Salah satunya adalah Perjuangan rakyat Cipelem bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Angkatan Darat yang tergolong dalam kelompok Macan Ketawa yang kini diabadikan dengan sebuah Tugu Pertempuran Cipelem (29 Desember 1949) yang bertempat di Kampung Cipelem Desa Pabuaran.<sup>15</sup>

### **1. Kondisi Sosial di Pabuaran**

Blokade Banten oleh Belanda membuat Banten menjadi daerah yang terisolasi, Belanda menjaga ketat daerah perbatasan terhadap arus orang dan barang kebutuhan sehari-hari yang masuk dan keluar daerah Banten. Karena penjagaan ketat itu, maka untuk masuk ke Banten dan sebaliknya tidak mudah, bahkan berbahaya.<sup>16</sup> Akibat blokade itu barang-barang kebutuhan sehari-hari yang biasanya didatangkan dari luar daerah Banten sulit diperoleh, akibatnya harga melambung tinggi

---

<sup>15</sup>Antawi, "Peristiwa Cipelem Tahun 1945-1949" diwawancarai oleh Sahroni, di Pasar Sore, Pabuaran-Serang, 20 Februari 2014. Pukul 10.58 WIB

<sup>16</sup> Suharto, " *Dinamika Suatu...*, p.6.

guna mengatasi kebutuhan ada yang ditempuh dengan membuat sendiri atau mengganti dengan bahan lain adapula yang membelinya keluar daerah Banten.

Beberapa jenis barang tersebut diantaranya bensin, vaselin, granat, garam dan bahan komoditi lainnya. Bahkan minyak pelumas juga dibuat sendiri dari minyak kelapa sawit, kekurangan senjata diatasi dengan membuat mortir, larasnya dibuat dari pipa bekas tiang listrik, akan tetapi karna tidak dilengkapi dengan alat kontrol maka sering pelurunya tidak melontar, dan juga alat-ala semisal bom tarik dan geranat bambu.<sup>17</sup> Begitu juga dengan keadaan masyarakat Pabuaran merasakan kelangkaan barang-barang yang selama ini dijadikan kebutuhan sehari-hari. Harga semakin tidak dapat dijangkau karena harga yang semakin melambung tinggi, kelangkaan bahan pokok itu masyarakat Pabuaran mensiasatinya dengan barang-barang apa adanya seperti: minyak tanah diganti dengan minyak kelapa bahkan ada yang hanya menyalakan kayu bakar dan duan kelapa tua untuk penerangan malam hari.

Masyarakat Pabuaran merasakan blokade Belanda sampai kelangkaan bahan tekstil, baju celana bahkan dari mereka ada yang hanya menggunakan celana saja karena ketiadaan barang-barang tersebut, tidak hanya kelangkaan barang saja dipabuaran terjadi pencurian bahan pangan maupun hewan ternak mereka banyak yang hilang pada malam hari dikarenakan penerangan yang mengandalkan

---

<sup>17</sup>Suharto, “*Dinamika Suatu...*, p.8-9.

lampu tempel (lampu toktok) yang tidak bertahan lama karena minyak tanah sudah hilang diganti minyak kelapa.<sup>18</sup>

Kondisi rakyat yang miskin dan sulit, menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang besar dalam masyarakat Banten termasuk rakyat Pabuaran. Salah satu perubahan sosial yang mencolok adalah perubahan dalam pelapisan sosial, yang diterapkan oleh kaum penjajah terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pada masa Agresi Belanda I dan II, ada tiga lapisan dalam masyarakat Banten yang didasarkan atas ras, lapisan pertama terdiri dari golongan orang Belanda dan Eropa lainnya, lapisan kedua adalah orang Timur Asing (Cina, Arab dan India), dan terakhir adalah bangsa Indonesia termasuk rakyat Banten.

Situasi sosial yang sulit menyebabkan para guru disekolah-sekolah di Pabuaran tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sebab banyak sekolahan yang dijadikan sebagai markas tentara atau tempat menampung pengungsi yang menjadi korban penyerbuan Belanda, guru-gurunya ada yang merangkap tugas sebagai guru di siang hari dan malam harinya bergerilya. Namun, bila mereka harus bertempur di siang hari maka sekolah diliburkan, sehingga banyak murid yang tidak dapat menyelesaikan sekolahnya, dan guru-guru terpaksa meninggalkan sekolah karena tanah air menuntut jiwa dan raga mereka demi kemerdekaan. Kondisi ini berlangsung sampai akhir tahun 1949.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Antawi, "PeristiwaCipelem Tahun 1945-1949" diwawancarai oleh Sahroni, di Pasar Sore, Pabuaran-Serang, 20 Februari 2014. Pukul 10.58 WIB.

<sup>19</sup>Lubis, *Banten Dalam...*, p. 180.

## **2. Kondisi Politik di Pabuaran**

Banten diblokade dari berbagai sektor sehingga terjadi kelangkaan barang-barang maupun bahan-bahan kebutuhan sehari-hari masyarakat Banten terus bertahan demi membela kemerdekaan bangsa. Setelah pertempuran-pertempuran yang dilakukan pasukan militer Indonesia di beberapa perbatasan Banten yang akhirnya basis-basis tentara Indonesia dapat dihancurkan sehingga mereka membuat kekuatan kepedalaman Banten, terlebih setelah perjanjian Renville, yaitu pasukan Siliwangi harus menyusup ke daerah musuh untuk kembali ke daerah asalnya. Sebagaimana tertuang dalam intruksi Panglima Besar Jendral Soedirman tanggal 9 November 1948 yang terkenal dengan “ Perintah Siasat No. I yang isinya antara lain sebagai berikut:

Pertama, perintah untuk memperlambat gerak maju atau serangan Belanda, pengungsian, dan pembumi hangusan secara total dan kedua, tugas membuat kantong-kantong perlawanan disetiap kawedanan militer.

Sehubungan dengan intruksi itu, tidak lama kemudian Brigade I Tirtayasa telah menyelesaikan garis besar rencana pertahanan dan rencana itu dikirim kepada masing-masing komandan batalyon dalam amplop yang disegel dan baru boleh dibuka setelah ada serangan agresi Belanda. Pada dasarnya rencana itu terdiri dari dua fase. Pertama TNI melakukan gerakan penghambatan gerak maju dengan pengrusakan jalan-jalan yang strategis, penghancuran jembatan-jembatan, termasuk jembatan kereta api antara Parungpanjang dan Rangkasbitung,

membuat rintangan dijalan dengan pepohonan, menghancurkan sesemua bangujan vital dan besar seperti pabrik, kantor telpon, dan transformasi listrik, yang menjadi fasilitas untuk jalannya suatu pemerintahan.<sup>20</sup>

Penyerbuan secara besar-besaran oleh belanda dilakukan oleh Pasukan Brigade Infanteri 1 Divisi 7 Desember yang berkekuatan sekitar 1000 personil dibawah pimpinan Kolonel Blanken, yang dilakukan dua tahap, tahap pertama mereka secepat mungkin menyerbu dan mengikuti jalan raya untuk menduduki kota-kota dan pusat-pusat perhubungan. Pada tanggal 23 Desember 1948, mereka melancarkan operasi pembersihan kekuatan TNI sektor demi sektor, dan membentuk pemerintahan sipil serta merehabilitasi jalan yang rusak. Pada tanggal 23 Desember 1948 Pasukan Belanda tiba dipantai utara masuk ke Tangerang dengan kekuatan satu batalyon infanteri yag diperkuat oleh artileri medan, satu pleton mitraliur, dua pleton zeni dan satu kompi angkutan bermotor yang dipelopori oleh satu eskadron kavaleri lapis baja, mereka masuk melewati daerah Mauk dan ada juga yang langsung menuju Serang, sehingga perlawanan demi perlawanan Tentara Indonesiadan rakyat yang ada diperbatasan wilayah Banten dapat dipukul mundur. Para tentara Indonesia yang berhasil dipukul mundur oleh Belanda akhirnya mereka menyusun kekuatan dibeberapa daerah termasuk didaerah Pabuaran mereka membentuk kekuatan baru

---

<sup>20</sup> Tb. Doni Nurpatia, *Pandeglang Selatan Pusat Komando Geriliya Karesidenan Banten 1948-1949*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia , 2002), p. 34-35.

bersama para rakyat untuk melawan penjajah Belanda. Sehingga Pada tahun 1949 terjadi peristiwa perang total yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Indonesia khususnya di Pabuaran. adalah perjuangan Tentara Negara Indonesia (TNI) dari Angkatan Darat, Kiyai (Ulama), Jawara, dan masyarakat sekitar dalam peristiwa di Cipelem, Pabuaran, Serang.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Marwan, "PeristiwaCipelem Tahun 1945-1949" diwawancarai oleh Sahroni, di Kp. Asem, Pabuaran-Serang, 20 Februari 2014. Pukul 13.56 WIB.